

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Modal cair untuk membangun dapat diperoleh dengan cara: modal dalam negeri yang berasal dari devisa dan tabungan masyarakat, hutang dari dalam dan luar negeri, mengundang investasi. Apabila modal yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan lebih besar dari pada modal yang dapat dikerahkan di dalam negeri, maka usaha pengerahan modal dari luar negeri perlu dilakukan.

Seperti halnya kebanyakan negara berkembang, Indonesia mengalami kesulitan dalam hal pengerahan modal. Pendapatan perkapita masyarakat yang relatif rendah menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Rendahnya tingkat tabungan dan pendapatan pajak menimbulkan suatu masalah yang serius di negara berkembang termasuk Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya terdapat di negara-negara yang sebagian besar produk nasionalnya diinvestasikan. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu sebagai salah satu aspek dalam kebijakan pembangunan di negara berkembang perlu dilakukan usaha-usaha untuk memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan.<sup>1</sup>

Dalam penelitiannya, Basuki dan Sulisty<sup>2</sup> menemukan bahwa antara pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tingkat tabungan domestik tidak saling mempengaruhi atau bersifat independen. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat tabungan terhadap pendapatan nasional sehingga tabungan domestik belum dapat diandalkan sebagai sumber investasi untuk mendorong pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Berta Gorat, Medan, 1988, hal. 350.

<sup>2</sup> Basuki dan Sulisty, "Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia" *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 12, No. 2, 1997.

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih banyak didorong oleh dana dari luar negeri, berupa hutang luar negeri ataupun modal asing.

Kuatnya usaha negara berkembang termasuk Indonesia untuk menarik modal langsung dari luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) adanya kesadaran bahwa bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri masih belum cukup untuk mengatasi masalah jurang ganda antara tabungan investasi dan jurang devisa yang dihadapi, dan penanaman modal asing langsung dapat membantu mengatasi masalah kekuarangan investasi dan kekuarangan devisa; (2) mempertinggi tingkat penanaman modal; (3) mempercepat tingkat pembangunan ekonomi; (4) penanaman modal asing langsung membawa serta tenaga manajemen, keahlian kewirausahaan, keahlian teknik, dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran barang yang dihasilkan; (5) mempercepat proses perkenalan teknologi baru (*transfer of technology*); (6) menambah kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran; (7) bagi pemerintah, merupakan sumber penghasilan pendapatan berupa pajak keuntungan, dan royalti dari konsesi penguasaan kekayaan alam.<sup>3</sup>

Peran penanaman modal asing (FDI) dalam proses pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi nasional maupun pembangunan ekonomi daerah. Bersama-sama dengan investasi domestik dan investasi masyarakat, FDI masih merupakan pilihan strategis untuk kebangkitan perekonomian Indonesia.

Pada tahun-tahun terakhir ini timbul fenomena baru di negara-negara berkembang untuk mengalihkan perhatian pada bentuk alternatif bagi pembiayaan pembangunan yang berasal dari pihak asing. Dengan kata lain telah timbul kecondongan kebijakan untuk mengurangi porsi utang luar negeri dan memperbesar porsi bentuk pembiayaan jenis lainnya. Yang menjadi bentuk-bentuk alternatif pembiayaan pembangunan yang berasal dari pihak asing adalah investasi secara langsung (*foreign direct investment, project lending, portfolio investment* dan lain sebagainya).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Sadono Sukirno. *op.cit.* hal 379-380.

<sup>4</sup> Sritua Arief, "Utang Luar Negeri Versus Investasi Asing", *Kompas* 8 Juli 1994, hal. 4.

Secara umum investasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu portfolio dan investasi asing langsung. Investasi portfolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan penanaman modal asing atau FDI (*foreign direct investment*) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.<sup>5</sup> Dibanding dengan investasi portfolio, penanaman modal langsung dinilai lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen dan berjangka panjang, penanaman modal asing langsung memberi andil dalam alih teknologi, alih ketrampilan manajemen dan memberi lapangan pekerjaan baru.

FDI mulai masuk ke Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto dengan merubah kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Soekarno. Pada masa Soekarno tidak ada perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Sebaliknya pada masa Soeharto, MNC begitu mudah masuk, tumbuh dengan subur dan berkembang pesat. FDI sempat menjadi primadona dalam mitra pembangunan saat Indonesia melaju pada tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 7% per tahunnya. Ini terjadi sebelum krisis ekonomi terjadi.

Kehadiran FDI secara umum telah memberikan manfaat bagi negara penerima dan mitra bisnis lokal di negara tersebut. Bahkan jika upaya ini disiasati dengan lebih baik akan memberikan manfaat yang positif. Manfaat yang positif dari peningkatan FDI di berbagai negara bermanfaat baik bagi negara, pengusaha, dan konsumen dari negara penerima. Pengaruh positif dari kehadiran FDI adalah : menutup defisit neraca transaksi berjalan secara lebih netral. Selain itu dapat menyerap tenaga kerja trampil dan tenaga ahli khusus. Efek negatifnya adalah produksi yang berlebihan disuatu lokalitas dapat merusak kondisi lingkungan hidup. Tekanan politik dan iklim investasi yang tidak menguntungkan dapat mendorong perusahaan MNC melakukan relokasi kegiatannya ketempat lain.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kehadiran FDI di Indonesia mulai membuahkan hasil. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967, permohonan PMA yang telah disetujui oleh pemerintah sampai

---

<sup>5</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta. Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal. 47.

akhir tahun 1999 adalah sebanyak 3.456 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 67 milyar. Bidang investasi yang menonjol adalah kegiatan-kegiatan pada industri logam dan mesin, percetakan, kendaraan bermotor, tekstil, perdagangan dan perkebunan.<sup>6</sup>

Untuk mendorong peningkatan investasi dari FDI ini perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Iklim investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi di lokalitas-lokalitas tempat investasi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan pada tingkat pusat dan daerah serta menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha. Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor yang meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabean, perpajakan dan pertahanan wilayah.

Bagi kepentingan para penanam modal asing maka selain iklim investasi tersebut, perlu juga didukung dengan perlakuan yang tidak diskriminatif yang diberikan pada pengusaha lokal atau domestik dalam memperebutkan pangsa pasar. Selain itu juga ketersediaan fasilitas prasaranan industri seperti pergudangan, jalur transportasi untuk logistik barang, pelabuhan, terminal, sumber energi, air bersih, lembaga-lembaga ekonomi dan finansial pedesaan dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan demi terselenggaranya kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Sadono Sukirno menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat penanaman modal yang maksimal, berbagai macam perangsang perlu diberikan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Diantara berbagai macam perangsang tersebut adalah memberi kelonggaran-kelonggaran dalam kewajiban untuk membayar pajak pendapatan perusahaan, seperti memberikan pembebasan sementara pajak pendapatan (*tax holidays*), tidak mengenakan pajak atas

<sup>6</sup> Data dari BKPM tahun 1999.

<sup>7</sup> Sadono Sukirno. *op.cit.* hal 359-360.

keuntungan yang ditanam kembali, dan memperkenankan mempercepat depresiasi modal.

Untuk memperlancar arus modal asing yang masuk ke Indonesia, maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan negara yang dituju. Dalam tesis ini yang akan dibahas adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Sebelumnya pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara telah dilakukan pada bulan Agustus 1966. Pemerintah Korsel membuka Kantor Perwakilan tingkat Konsulat Jenderal di Jakarta pada bulan Desember 1966, sedangkan Konsulat Jenderal RI di Seoul di buka pada tahun 1968. Kemudian status Perwakilan RI ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar yang ditandai dengan dibukanya kedutaan besar tiap-tiap negara pada tanggal 18 November 1973.

Sejak pembukaan hubungan diplomatik sampai saat ini hubungan antara kedua negara di bidang politik tidak pernah ada masalah dan selalu berjalan dengan baik dan saling mendukung dalam berbagai forum regional maupun internasional. Hubungan bersahabat dan saling kunjung di antara kedua kepala negara menandakan baiknya hubungan pemerintah dan rakyat kedua negara. Antara Indonesia dan Korea Selatan ada hubungan saling ketergantungan, saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan menandatangani persetujuan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal. Dalam persetujuan tersebut, masing-masing pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para investor pihak lainnya untuk menanam modal diwilayahnya dan mengizinkan penanaman modal itu menurut peraturan perundang-undangannya. Penanaman modal oleh para investor masing-masing pihak harus setiap waktu diperlukan secara adil dan layak serta mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di dalam wilayah pihak lainnya.

Pada tahun 1997, banyak negara-negara di Asia dilanda krisis moneter tidak terkecuali Indonesia dan Korea Selatan. Kondisi perekonomian Indonesia

yang paling parah diantara negara-negara yang dilanda krisis ekonomi tersebut. Sementara Korea Selatan berhasil mengembalikan stabilitas ekonominya ke posisi semula dalam jangka waktu dua tahun. Program restrukturisasi yang dijalankan pemerintah berhasil menciptakan mekanisme ekonomi yang lebih sehat. Selain itu pasca krisis, sistem perekonomian Korea Selatan menjadi lebih terbuka dan kembali menguasai pasar di Asia.

Penjelasan berikut ini adalah perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam berbagai hal yang terkait didalamnya yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Data Tentang Indonesia dan Korea Selatan**

	<b>Korea Selatan</b>	<b>Indonesia</b>
Populasi (juta)	48	217.6
Area	99 (ribu Km <sup>2</sup> )	1.9 juta Km <sup>2</sup>
Militer (ribu)	686	380
GDP per kapita(\$)	18.374	1.693
Perdagangan (juta\$ )	634.900	161.900
	Ekspor(juta\$)	325.500
	Impor(juta\$)	61.100
Cadangan Valuta Asing(juta\$)	239.000	42.600

Sumber : Deplu RI dan Kedubes Korea, 2006.

Dalam penelitian ini batasan waktu yang digunakan adalah tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dengan asumsi bahwa Indonesia dan Korea Selatan adalah negara yang sama-sama mengalami krisis ekonomi. Dampak dari krisis ekonomi tersebut tentu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Korea Selatan maupun Indonesia. Nilai investasi Korea Selatan di Indonesia selama masa krisis mengalami penurunan. Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, dalam jangka waktu kurang lebih dua tahun Korea Selatan dapat keluar dari

krisis yang melanda negaranya. Sementara Indonesia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat keluar dari krisis ekonomi tersebut. Investasi Korea Selatan di Indonesia pada tahun 2006 menempati posisi 5 besar setelah Malaysia, Singapura, Republik Seychelles, Inggris, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

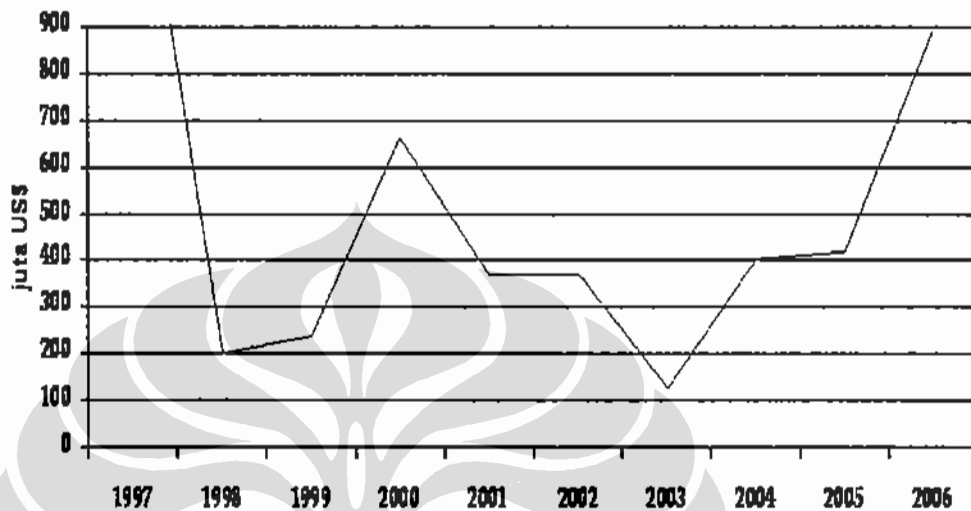
**Tabel 1.2.**  
**Negara Investor Besar di Indonesia Berdasarkan Investasi yang Disetujui**  
**(juta US\$, %)**

No.	Negara Asal	2006	
		Nilai	%
1	Malaysia	2.328,7	14,9
2	Singapura	2.185,6	14,0
3	Republik Seychelles	1.410,1	9,0
4	Inggris	1.039,1	6,6
5	Korea Selatan	887,2	5,7
6	Switzerland	477,7	3,1
7	Jepang	443,6	2,8
8	Hong Kong	398,6	2,5
9	Perancis	355,8	2,3
10	Taiwan	218,6	1,4

*Sumber : BKPM. 2006.*

Korea Selatan merupakan negara maju dengan tingkat produk domestik bruto (PDB) sebesar 8.874 juta dollar AS pada tahun 2006. Tingkat pertumbuhan ekonominya 5 % dengan surplus perdagangan 16.082 juta dollar AS. Di bidang investasi, jumlah persetujuan rencana investasi Korea Selatan di Indonesia dari tahun 1999-2006 tercatat 1.494 proyek dengan total nilai 2,5 miliar dollar AS. Dari rencana itu, investasi yang bias direalisasikan sebanyak 505 proyek dengan nilai 1,3 miliar dollar AS.

**Grafik 1.**  
**Perkembangan Investasi Korea Selatan di Indonesia**  
**1997-2006**



Sumber: BKPM, 2006.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dinamika investasi dari Korea Selatan ke Indonesia mengalami fluktuatif dimana titik terendah terjadi pada tahun 2003. Pada masa ini Korea Selatan mulai mengalihkan arus investasinya ke China dan Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pada tahun 2004 sampai tahun 2006 investasi dari Korea Selatan mulai meningkat kembali.

Dalam kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya dibahas masalah investasi saja, tetapi juga masalah perkembangan ekspor dan impor antara kedua negara. Selanjutnya pada tabel berikut dapat di lihat volume perdagangan antara Korea Selatan dan Indonesia. Korea adalah patner dagang Indonesia terbesar kelima. Indonesia adalah patner dagang Korea Selatan terbesar kesembilan.



Tabel 1.3.  
**Volume Perdagangan Korea Selatan ke Indonesia**  
*(jutaUS\$)*

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Volume Perdagangan	7.754	7.868	8.590	10.045	13.230	13.600
Ekspor ke RI	3.280	3.145	3.378	3.677	5.046	4.900
Impor dari RI	4.474	4.723	5.212	6.368	8.184	8.700

*Sumber: BKPM, 2006.*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan dari lima tahun terakhir semakin meningkat, dari tahun 2001 sebesar 7.754 juta US\$ sampai tahun 2006 sebesar 13.600 juta US\$. Ekspor ke Indonesia meningkat dari tahun 2001 sebesar 3.280 juta US\$ sampai tahun 2006 sebesar 4.900 juta US\$. Begitu juga dengan ekspor Indonesia ke Korea semakin meningkat dari tahun 2001 sebesar 4.474 juta US\$ sampai tahun 2006 sebesar 8.700 juta US\$.

Sampai dengan tahun 2006, Indonesia merupakan negara tujuan investasi terbesar ketiga bagi investasi Korea Selatan di luar negeri. Indonesia juga merupakan negara pemasok LNG terbesar, pemasok minyak mentah, produk kayu dan kertas.

Pemerintah sedang berusaha menarik modal asing dari Korea Selatan dengan fokusnya akan diarahkan ke industri manufaktur karena dalam tahun 1997-2006 modal asing yang masuk dari Korea Selatan ke Indonesia mengalami pasang surut. Usaha Indonesia dalam menarik modal asing tersebut mulai mendapat saingan dengan munculnya China sebagai negara "the emerging market" dan Vietnam sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Kehadiran modal asing sangat diperlukan untuk peningkatan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Modal asing bisa masuk ke Indonesia dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Kebijakan liberalisasi dan menciptakan iklim investasi sangat diperlukan tersebut.

Korea Selatan adalah salah satu negara industri maju di Asia yang pertumbuhan ekonominya mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun sempat menurun pada saat krisis ekonomi melanda negara tersebut. Dalam perkembangannya, Korea Selatan merupakan negara yang termasuk dalam sepuluh besar yang melakukan investasi di Indonesia.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu :

1. *"Bagaimana ciri khas dinamika investasi Korea Selatan di Indonesia periode 1997-2006 ?"*
2. *"Faktor-faktor apa yang secara signifikan berpengaruh bagi investasi Korea Selatan di Indonesia ?"*

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa dinamika investasi yang dilakukan Korea Selatan di Indonesia dalam periode 1997-2006. Selanjutnya untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi dari Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu untuk dapat memahami bagaimana implementasi masuknya modal asing terhadap pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman, menambah wawasan pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat kepada pembaca sekalian mengenai modal asing. Selanjutnya untuk dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea ke Indonesia. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pembuat

keputusan dalam penarikan modal asing ke Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian lanjutan serupa.

## 1.5. Kerangka Teori

### 1.5.1. Tinjauan Pustaka

Salah satu kendala untuk bisa memahami hubungan yang berkembang antara Korea Selatan dan Indonesia adalah kelangkaan karya tulis ilmiah mengenai topik ini. Sedikit sekali karya ilmiah yang membahas hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia di bidang investasi, baik yang ditulis oleh ilmuan Korea Selatan maupun ilmuan Indonesia.

Penelitian dari Hadi Soesastro dalam bukunya yang berjudul *Korean Investments in Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 1993, mengatakan bahwa investasi manufaktur Korea Selatan di Indonesia berawal pada paruh kedua dasawarsa 1980-an, tepatnya pada tahun 1987 di mana investasi negara tersebut mengalami lonjakan yang hebat dibanding tahun sebelumnya dan pola ini bertahan hingga awal dasawarsa 1990.<sup>8</sup> Pada periode ini tampak bahwa Indonesia atau negara di kawasan Asia lainnya merupakan daerah investasi yang dipandang paling menarik oleh Korea Selatan di samping Amerika Serikat. Kenyataan bahwa kawasan Asia Tenggara merebut 30% dari keseluruhan investasi asing Korea Selatan, dan Amerika Serikat mendapatkan sekitar 47%.

Menurut Hadi Soesastro, satu catatan penting sehubungan dengan investasi Korea Selatan di Indonesia adalah menonjolnya ciri orientasi ekspor dan padat karya dan teknologi serta berskala relatif kecil pada proyek-proyek investasi yang dijalankan oleh negara tersebut. Ciri orientasi ekspor ini terlihat dari kondisi bahwa sekitar 80% proyek investasi Korea Selatan di Indonesia adalah proyek yang berorientasi ekspor.

Sementara studi yang dilakukan Kim Young Soo mengenai investasi Korea Selatan di Indonesia semata-mata disebabkan karena terjadi pergeseran struktur keunggulan komparatif industri manufaktur Korea Selatan pada

---

<sup>8</sup> Hadi Soesastro, *Korean Investments in Indonesia*. Jakarta, CSIS, 1993, hal. 14.

pertengahan dasawarsa 1980an. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa 90% proyek investasi Korea Selatan di Indonesia baru dimulai pada dasawarsa 1980an ketika struktur industri Korea Selatan mengalami perubahan dan penekanan biaya produksi.<sup>9</sup>

Proyek-proyek investasi Korea Selatan, mempunyai ciri-ciri padat karya dan tidak padat modal. Sektor-sektor yang dimasukinya pun terbatas yakni, industri pakaian jadi (*garment*), tekstil dan sepatu. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa daya tarik utama iklim investasi Indonesia pada periode tersebut adalah upah buruh yang murah dan perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian yang terbaru mengenai hubungan Indonesia dan Korea Selatan adalah yang ditulis oleh Yang Seung-Yoon yang diterbitkan pada tahun 2005 berjudul *40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan*.<sup>10</sup> Buku ini lebih banyak membahas tentang dinamika hubungan Indonesia-Korea Selatan yang difokuskan kepada perkembangan hubungan politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan dan kebudayaan antara Indonesia-Korea Selatan.

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan pokok yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan, penanaman modal asing, saling ketergantungan, dan *comparative advantage*.

#### **Penanaman modal asing**

Adapun teorisasi tentang penanaman modal asing yakni merujuk pada aliran modal internasional dimana perusahaan suatu negara mengadakan atau memperluas jangkauan terhadap negara yang menerima investasinya.

---

<sup>9</sup> Kim Young Soo, *Korean Direct Foreign Investment in Indonesia: A Study of Korean Joint Venture*, Tesis-UI, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990.

<sup>10</sup> Yang Seung-Yoon, *40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005.

Menurut Krugman<sup>11</sup> investasi langsung (FDI) didefinisikan sebagai arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan, memperluas perusahaannya di negara lain. Investasi asing langsung ini melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya alam tetapi juga pengendalian. Perusahaan yang didirikan di negara tempat investasi memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaan karena merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama.

Kemudian yang perlu diketahui adalah *controlled subsidiary* atau pihak yang menerima investasi seringkali menerima input keterampilan manajerial, rahasia perdagangan, teknologi, dan instruksi tentang apa yang harus diraih dan dihindari.<sup>12</sup>

Selanjutnya Robert Gilpin<sup>13</sup> menganggap bahwa penanaman modal asing mempunyai arti penting dalam ekonomi global. Hal ini diterangkan dalam berbagai tanggapan terhadap kekuatan kepercayaannya dalam keunggulan-keunggulan pasar dan institusi. Ia juga percaya bahwa suatu perilaku perusahaan hampir seluruhnya ditentukan oleh penjualan. Oleh karena itu perusahaan bisa berkembang dan maju jika dalam pelaksanaannya didukung oleh negara baik dalam kebijakan domestik atau kebijakan-kebijakan berskala internasional. Robert Gilpin juga menilai jika sebuah negara berkembang tidak dapat menarik penanaman modal asing, akan sulit baginya untuk mendapatkan akses keuangan, teknologi dan pasar internasional yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.

Sementara itu Kojima<sup>14</sup> membedakan penanaman modal asing kedalam 4 tipe yaitu : 1. Yang berorientasi ke sumber daya alam (*natural resources oriented*); 2. Yang berorientasi ke sumber daya manusia (*labour oriented*); 3. Yang berorientasi ke pasar (*market oriented*); 4. Yang berorientasi ke pasar monopoli (*oligopolitics market*). Tipe 1 dan 2 jelas berorientasi ke perdagangan

---

<sup>11</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obsfeld, *International Economics: Theory and Policy*, 2<sup>nd</sup> ed. New York, Harper Collins Publisher, 1991, hal. 165.

<sup>12</sup> John H. Dunning, *Multinational Enterprises and the Global Economy*, USA, Addison-Wesley Publishing Company, 1993, hal 57.

<sup>13</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*, Princeton University Press, 2001, hal. 303.

<sup>14</sup> Kiyashi Kojima, *A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment*, Hitotsubashi Journal of Economics, Juni, 1973.

(*trade oriented*), tipe 3 berorientasi ke perdagangan jika substitusi impor bergeser ke orientasi ekspor dan tipe 4 bersifat anti perdagangan.

Teori lain adalah teori Alan M. Rugman yang menyatakan bahwa PMA atau FDI dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internasionalisasi.<sup>15</sup> Variabel lingkungan disebut sebagai keunggulan spesifik negara (KSN) atau faktor spesifik lokasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi meliputi modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). Hal lain mencakup teknologi, tersedianya sumber daya alam, dan keterampilan manajemen. Disamping variabel ekonomi, faktor spesifik negara juga meliputi variabel politik, budaya, dan sosial pada setiap bangsa.

Hadi Soesastro<sup>16</sup> menyatakan bahwa arus investasi di suatu kawasan dipengaruhi atas faktor penarik (*pull factor*) dan pendorong (*push factor*). Faktor penarik adalah hal-hal yang terkait dengan negara yang akan dituju (*home country*) seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, iklim usaha dan investasi yang menarik dan sebagainya. Faktor pendorong adalah hal-hal yang terkait dengan negara asal seperti kebijakan investasi, perkembangan sosial dan ekonomi negara asal dan sebagainya.

Selanjutnya John H. Dunning<sup>17</sup> mengajukan kerangka teori untuk menelaah terjadinya arus PMA dari suatu negara ke negara lain yang dikenal dengan *electic theory*. Menurut teori ini terdapat tiga hal pokok yang menyebabkan terjadinya aliran modal dari suatu negara ke negara lain yaitu : *Pertama*, harus ada keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) dari perusahaan yang akan menanamkan modalnya. Keunggulan kepemilikan ini dapat berupa monopoli atas suatu produk atau merek tertentu, proses produksi yang lebih efisien, keahlian manajemen dan pengetahuan yang lebih mengenai pasar atau teknik pemasaran. Selain itu terdapat pula faktor eksternal (di negara asal

<sup>15</sup> Pandji Anoraga. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal. 50.

<sup>16</sup> Hadi Soesastro. *Trend Investasi*, Majalah Sinar No. 17, Tahun I, 4 Maret 1995.

<sup>17</sup> John H. Dunning. *Explaining Outward Investment of developing Countries: In Support of the Electic Theory of International Production*, Edited by Prof. Ku-Hyun Jung, The Graduate School of International Studies, Yonsei University, Seoul, Korea. 1989, hal. 9-31.

modal) seperti tingginya tingkat upah, energi yang semakin mahal, terbatasnya sumber daya alam, ketatnya peraturan mengenai lingkungan di dalam negara dimana semua hal tersebut akan mendorong suatu perusahaan untuk beroperasi di negara lain.

*Kedua*, negara tuan rumah harus mempunyai keunggulan-keunggulan lokasional (*locational advantage*) untuk menarik calon investor asing menanamkan modalnya. Keunggulan ini berupa potensi pasar domestik yang besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, tenaga kerja yang murah, melimpahnya sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, insentif yang menarik. Apabila kondisi pertama dipenuhi tetapi syarat kedua tidak dipenuhi maka perusahaan atau investor asing yang biasanya merupakan perusahaan multinasional akan memilih untuk melakukan ekspor ke negara yang bersangkutan sebagai cara untuk memanfaatkan keunggulan kepemilikannya.

*Ketiga*, meskipun syarat pertama dan kedua dipenuhi harus ada keunggulan internalisasi (*internalization advantage*) yang mendorong perusahaan atau investor asing untuk melakukan investasi langsung dalam bentuk PMA dan tidak memiliki cara lain seperti melalui lisensi, pembelian saham (*portfolio investment*) atau waralaba (*franchising*).

### **Saling Ketergantungan**

Sampai saat ini telah banyak diskusi tentang saling ketergantungan internasional. Bahkan telah terjadi perdebatan tentang apakah memang telah terjadi peningkatan saling ketergantungan dalam sistem internasional. Ilmuwan seperti Keohane dan Nye<sup>16</sup> memandang saling ketergantungan sebagai ketergantungan yang saling menguntungkan yang melibatkan kerentanan dan kepekaan. Sedangkan ilmuwan lain menganggap saling ketergantungan sebagai efek timbal balik antar negara.

---

<sup>16</sup> Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston. Little Brown & Co. 1997.

Teori saling ketergantungan selain menitikberatkan hubungan kerjasama dengan kemauan sendiri antara objek-objek ekonomi tersendiri, juga mengutamakan terbukanya sistem ekonomi bagi semua negara peserta.

Menurut William D. Coplin<sup>19</sup> keadaan saling ketergantungan antar negara merupakan pertukaran efek timbal balik yang saling mempengaruhi antara negara yang satu dengan yang lain. Ia juga menekankan bahwa pertukaran sosial, budaya, ekonomi dan politik antar negara memperbesar saling ketergantungan antar negara-negara terkait. Ditegaskan pula bahwa peningkatan kecenderungan saling ketergantungan antar negara dapat diukur dari peningkatan komunikasi dan jumlah pelancong, pertukaran produk, transfer teknologi, dan partisipasi dalam organisasi-organisasi baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Pendapat lain diungkapkan oleh Rosecrane<sup>20</sup> dan beberapa ilmuwan lain dengan menggunakan dua konsep dimensional yang berbeda yaitu saling ketergantungan horisontal dan vertikal. Dikatakan bahwa saling ketergantungan horisontal dapat diukur dengan transaksi antar negara, sedangkan saling ketergantungan vertikal berarti penyeragaman nilai faktor diantara negara-negara.

Menurut R. Dan Walleri<sup>21</sup> dunia liberalisme memaksimalkan kapitalisme bebas dan hak memiliki kekayaan, serta menciptakan pemerintah kecil yang dibatasi campur tangannya. Dalam keadaan semacam itu, pasar yang tetap menjamin persaingan bebas dan sempurna akan dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang maksimum dan juga akan membuahkan kesejahteraan untuk umum. Dalam keadaan saling ketergantungan tersebut, para pelaku tidak melakukannya dengan kemauannya sendiri seperti halnya untuk menjaga dan mempertahankan 'status-quo'-nya. Dalam hal itu hubungan saling ketergantungan antarnegara pada umumnya akan berkembang secara seimbang.

---

<sup>19</sup> William D. Coplin, *Introduction to International Politics* (3<sup>rd</sup> edition), Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall International Inc, 1980.

<sup>20</sup> R. Rosecrane et al. "Wither Interdependence?", *International Organization*, Vol. 31, 1977.

<sup>21</sup> R. Dan Walleri. "The Political Economy Literature of North-South Relations", *International Studies Quarterly*, 1978, 587-624.



### *Comparative Advantage*

David Ricardo menyatakan bahwa satu negara yang memiliki tingkat produktivitas tinggi akan tetap mengadakan interaksi dengan negara lain selama produksi komoditas yang berbeda mampu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Interaksi ekonomi setiap negara, dalam hal ini perdagangan, akan terjadi dengan adanya perbedaan *opportunity cost* dari setiap komoditi barang, yakni jumlah barang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sejumlah barang lainnya.<sup>22</sup>

Walaupun Ricardo menyatakan bahwa perdagangan antar negara dipengaruhi oleh faktor *comparative advantage* berdasarkan hitungan efisiensi tenaga kerja sumber daya manusia (buruh) yang menentukan jenis produksi yang paling efisien untuk dihasilkan, namun pada perkembangannya faktor *comparative advantage* juga dipengaruhi oleh sumber-sumber produksi yang dimiliki dan juga diperoleh oleh sebuah negara. Hal ini dinyatakan oleh Robert J. Carbaugh<sup>23</sup> yang memperlihatkan bahwa setiap negara dapat mempunyai *comparative advantage* berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya, juga dapat diperoleh melalui pengembangan spesialisasi tertentu yang dilakukan oleh suatu negara.

*Comparative advantage* selain dipergunakan untuk menjelaskan fenomena perdagangan, juga dipergunakan untuk menjelaskan terjadinya investasi antar negara. Namun seiring dengan perkembangan internasional saat ini, *comparative advantage* tidak saja menyangkut sektor-sektor ekonomi, namun juga kebijakan pemerintah serta kondisi keamanan dan perpolitikan negara yang kondusif untuk interaksi perdagangan (*country risk*) dan tentu saja investasi asing, khususnya PMA.

Dalam teori ini ada empat hal yang dapat digarisbawahi yaitu sumber daya, khususnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, *opportunity cost* dan *country risk*. Sumber daya alam mengacu pada kualitas dan kuantitas sumber

---

<sup>22</sup> Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Macroeconomics*, 3<sup>rd</sup> Ed., New Jersey: Prentice Hall International, 1995, halaman, 194.

<sup>23</sup> Robert J. Carbaugh, *International Economics*, Ohi, South-Western College Publising, 2000, hal. 28-53.

daya alam tertentu yang dalam hal ini memiliki daya tarik kuat terhadap proses produksi MNC di negara tujuan investasi. Sumber daya manusia menyangkut kuantitas sumber daya manusia, ketrampilan, tingkat upah dan etos kerja.

*Opportunity cost* merupakan biaya yang terjadi akibat konsekuensi aktivitas ekonomi yang tidak dipergunakan secara maksimal<sup>24</sup>. *Opportunity cost* dapat dikatakan merupakan pilihan yang memiliki konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi, dimana pilihan yang tidak mampu menghasilkan keuntungan maksimal akan mengakibatkan konsekuensi biaya/kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih.

Sedangkan *country risk* adalah kondisi perubahan yang mungkin terjadi dan memiliki dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di suatu negara.<sup>25</sup> *Country risk* mengacu pada kondisi politik, moneter dan juga kondisi khusus yang terjadi di dalam negara yang bersangkutan (misalnya: terjadinya peperangan, kudeta, dll).

Pajak memiliki dampak terhadap *country risk* dari segi tingkat yang dibebankan terhadap pihak investor ataupun terhadap aktivitas ekonomi di negara tertentu. Pajak dapat dikatakan merupakan pertimbangan biaya bagi MNC yang bersangkutan dalam mempertimbangkan aktivitas produksinya.

Teori *comparative advantage* pada dasarnya dipergunakan untuk memperlihatkan alternatif bagi sebuah negara dalam memproduksi berdasarkan kondisi-kondisi keuntungan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini teori tersebut akan dipergunakan untuk memperlihatkan kondisi-kondisi yang menguntungkan dari Indonesia dalam mengadakan aktivitas ekonomi, yang mampu menarik perhatian investor untuk menanamkan PMA.

### 1.5.3. Operasionalisasi konsep

Sejak awal masa pemerintahannya, pemerintah Orde Baru berusaha menarik modal asing sebanyak mungkin untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang

<sup>24</sup> Robert S. Pindyck, *loc.cit.*

<sup>25</sup> John Ries, "Country Risk Definition", dalam [http://www.creditworthy.com/topics/countryrisk\\_definition.asp](http://www.creditworthy.com/topics/countryrisk_definition.asp). Diakses pada tanggal 9 Maret 2008, pukul 21.05.

berlimpah, Indonesia muncul sebagai salah satu negara berkembang yang layak dijadikan sebagai tempat penanaman modal.

Pada tahun-tahun pertama pemerintahan Orde Baru, pemerintah membuat suatu perubahan kebijakan investasi asing yang sangat mendasar. Sebelumnya pemerintah melakukan nasionalisasi dan menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap modal asing, khususnya yang datang dari negara-negara barat. Selanjutnya pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan UU PMA No. 1/1967 sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan investor asing agar bersedia memasukkan modalnya ke Indonesia.

Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk memobilisasi investasi asing ke Indonesia karena sewaktu pemerintahan orde baru menggantikan pemerintahan orde lama pada tahun 1966, ekonomi Indonesia telah merosot. Untuk memulihkan stabilitas makro ekonomi dan merehabilitasi prasarana fisik dan kapasitas produksi diberbagai sektor ekonomi yang sempat terbengkalai, maka pemerintahan menempuh kebijakan yang pragmatis yaitu kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) terhadap investasi asing. Kebijakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya UU PMA No 1/1967 tersebut.

Menghadapi persaingan untuk menarik investasi asing yang semakin ketat, pemerintah Indonesia didorong untuk memberikan kelonggaran yang lebih luas kepada modal asing untuk beroperasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PP No. 20 Tahun 1994. Setelah dikeluarkannya PP No. 20 tahun 1994 nampak adanya peningkatan investasi asing yang cukup mencolok di Indonesia.

Indonesia tergolong negara yang bebas terhadap FDI. Ada dua tonggak perubahan kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam liberalisasi terhadap FDI yaitu tonggak pertama, pada pertengahan tahun 80-an ketika pemerintah mengubah positive list investasi menjadi negative list investasi. Tonggak kedua, pada paruh pertama tahun 90-an ketika pemerintah mengizinkan kepemilikan saham 100 persen FDI. Bersamaan dengan itu pemerintah terus menggalakkan berbagai kemudahan bagi FDI khususnya melalui insentif fiskal. Dan saat ini usaha itu makin gencar dilakukan mengingat kita butuh lapangan kerja baru untuk mengatasi meningkatnya pengangguran.

Rostow mengatakan jika suatu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan, maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu.<sup>26</sup> Dalam artian negara tersebut harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alam sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya. Namun jika tidak pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan berimbas kepada jumlah lapangan kerja. Bentuk stimulus yang diungkapkan oleh Rostow tentang cara memperoleh dana investasi diantaranya dapat diperoleh dari investasi langsung atau modal asing langsung yang ditanamkan misalnya pada bidang pembangunan, sarana dan prasarana, pembukaan sektor produktif lainnya. Sementara Barbaros Athur Lewis<sup>27</sup> beranggapan bahwa jika suatu negara ingin membangun infrastruktur untuk pembangunan ekonominya, maka perlu mendapat modal dari luar.

Korea Selatan yang telah mulai berhasil mengembangkan perekonomiannya sejak awal tahun 60-an ikut menanamkan modalnya ke Indonesia. Pada akhir tahun 60-an, Indonesia merupakan negara pertama tempat Korea menanamkan modalnya pada perkembangan industri pertanian dan sampai saat ini terus berkembang sebagai negara yang paling banyak menguasai total penanaman modal diantara semua negara di wilayah Asia Tenggara.

Hubungan ekonomi menjadi salah satu hubungan yang mengalami peningkatan yang paling pesat. Hubungan kerjasama ekonomi ini adalah hubungan saling ketergantungan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama lain. Hubungan saling ketergantungan antar aktor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memaksimalkan kesejahteraan dengan mendorong kerjasama di berbagai bidang. Saling ketergantungan antar negara dibidang ekonomi khususnya menghasilkan perdagangan internasional.

---

<sup>26</sup> Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, hal 17.

<sup>27</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Princeton University Press, 2001. hal. 303.

Kemampuan dan kekuatan suatu negara dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional akan menemukan besaran perolehan yang didapat setiap negara. Kemampuan tersebut tidak semata-mata diukur dari kepemilikan sumber daya nasional seperti halnya politik dan militer semata, namun juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi yaitu dari investasi dan perdagangan internasional termasuk aktor-aktor lain yaitu investor asing atau MNC.

Karakteristik hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan dapat dijelaskan melalui konsep saling ketergantungan horisontal. Saling ketergantungan horisontal mengacu pada suatu keadaan dimana dua negara atau lebih saling bertukar pengaruh. Keadaan ini dapat diukur dari volume kontak bilateral dan ekspansi perdagangan dan investasi keduanya. Bagi Korea Selatan hubungan dengan Indonesia memberinya peluang untuk bisa lebih dominan dari Jepang, China, Amerika Serikat dan negara-negara besar lain dalam mengakses sumber daya alam dan pasar hasil produksinya. Sedangkan bagi Indonesia, hubungan dengan Korea Selatan memberinya peluang untuk memperoleh akses alternatif bagi pasar ekspor ataupun sumber investasi dan teknologi.

Hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan Korea dapat dilihat bahwa Indonesia unggul dalam 3 hal yaitu sumber alam yang berlimpah, sumber daya manusia yang banyak, serta pasar yang luas dan aktif. Sementara Korea unggul dalam 2 hal yaitu modal dan teknologi yang memadai. Keunggulan masing-masing dapat digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain.

#### **1.6. Asumsi**

Asumsi yang mendasari tulisan ini adalah, penanaman modal asing dan perdagangan antar negara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan serta pembangunan ekonomi suatu negara.

#### **1.7. Hipotesa**

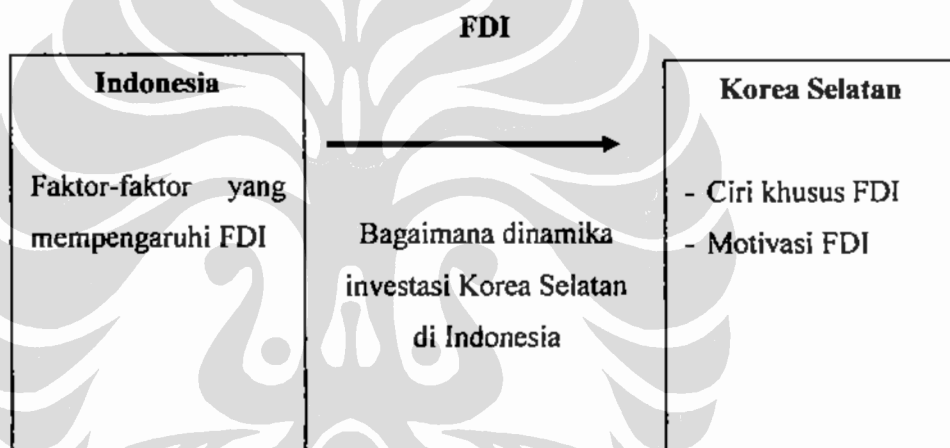
Berdasarkan kerangka pemikiran seperti yang diuraikan diatas, diambil hipotesis sebagai berikut:

Pertama, dinamika investasi Korea Selatan di Indonesia periode 1999-2006 menggambarkan bahwa adanya saling ketergantungan horisontal antara kedua negara.

Kedua, Indonesia makin bersaing dengan China dan Vietnam dalam menarik investasi dari Korea Selatan dan mengakibatkan investasi dari Korea Selatan ke Indonesia mengalami penurunan

Ketiga, iklim investasi yang kondusif di Indonesia akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi dari Korea Selatan.

### 1.8. Model Analisis



### 1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian menurut Neuman dapat dilihat berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif (descriptive research) yakni penelitian yang menggambarkan secara spesifik, setting sosial dan hubungan yang terdapat dalam penelitian.<sup>28</sup> Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika investasi Korea Selatan di Indonesia.

<sup>28</sup> W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* Boston-London, Allin and Bacon, 1997, hal. 18-35.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen dan literatur. Studi dokumen adalah studi atau kajian yang dilakukan dokumen-dokumen negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Studi literatur adalah studi yang menggali kembali dasar-dasar ilmiah dari tema yang hendak diangkat melalui peninjauan karya-karya ilmiah bertema serupa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain.<sup>29</sup>

Dalam analisa data, peneliti akan menggunakan data kuantitatif seperti data peningkatan jumlah FDI Korea Selatan ke Indonesia. Selanjutnya peneliti juga menggunakan data kualitatif mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia untuk menarik FDI dari Korea Selatan.

Berdasarkan sumber datanya, peneliti mengumpulkan data primer (*primary sources*) dan data sekunder (*secondary source*). Data primer merupakan data yang berasal dokumen resmi dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan. Untuk Indonesia data tersebut berasal dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan pemerintahan Korea diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta. Sementara untuk data sekunder, peneliti memperoleh data-data tersebut melalui jurnal-jurnal seperti Jurnal Ekonomi dan Bisnis, jurnal online ProQuest, buku-buku, koran, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FISIP UI, Unit Perpustakaan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI, Perpustakaan LIPI, Perpustakaan CSIS serta situs-situs internet yang relevan.

#### **1.10. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ini akan dijabarkan dalam empat pembabakan yang terdiri dari :

BAB I adalah bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, asumsi, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Orientasi Penanaman Modal Asing (PMA) Korea Selatan ke Indonesia dan ASEAN yang berisis tentang Tinjauan Umum Perkembangan

---

<sup>29</sup> Alan Bryman. *Social Research Methods*. Oxford University Press. 2004. hlm. 455.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Korea Selatan, Orientasi PMA Korea Selatan ke Indonesia, Orientasi PMA Korea Selatan ke ASEAN

BAB III adalah Dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia Tahun 1997-2006 yang terdiri dari Dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia, Faktor China dan Vietnam Sebagai Tempat Investasi Yang Menarik Bagi Korea Selatan, Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Meningkatkan PMA..

BAB IV adalah Kesimpulan

